



[Vol. 3, No. 1, 2023]

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA SEKTOR PARIWISATA BALI

Aulya Stephanie Putri

Prodi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid

Email: Stephanieputriulya@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 13 Januari
2023

Revised: 06 Februari
2023

Accepted: 27 Februari
2023

Kata Kunci:

Perlindungan, Hukum,
Pekerja Perempuan
dan Pariwisata.

Keywords: Protection,
Law, Women Workers
and Tourism.

Abstrak

Artikel ini mengkaji dan menelaah tentang perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor Pariwisata Bali. Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor pariwisata Bali merupakan topik yang penting dalam konteks pembangunan pariwisata di Indonesia, sehingga mengharuskan perempuan untuk bekerja siang dan malam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan pemberdayaan pekerja perempuan di sektor pariwisata Bali, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum dan pemberdayaan pekerja perempuan, strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi pekerja perempuan dalam sektor pariwisata, dan dampak dari pemberdayaan pekerja perempuan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Bali. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif research, yaitu adalah studi literatur peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dalam sektor pariwisata Bali yang merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Abstract

This article examines and examines legal protection for female workers in the Bali Tourism sector. Legal protection for female workers in the Bali tourism sector is an important topic in the context of tourism development in Indonesia, requiring women to work day and night. This study aims to analyze the legal protection and empowerment of female workers in the Bali tourism sector, including factors that influence legal protection and empowerment of female workers, strategies used to increase the participation of female workers in the tourism sector, and the impact of empowering female workers on economic development and social in Bali. The research method used is normative research, namely the study of literature on statutory regulations and other legal materials. The research results show that legal protection for female workers in the Bali tourism sector is an integral part of efforts to achieve inclusive and sustainable economic development.



[Vol. 3, No. 1, 2023]

PENDAHULUAN

Dunia pariwisata telah lama menjadi tulang punggung bagi perekonomian di pulau Bali, yang menyediakan berbagai lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat. Pulau Bali yang merupakan destinasi wisata populer di Indonesia yang banyak menarik minat wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Peran perempuan di Bali terutama dalam sektor pariwisata sering kali terabaikan meskipun potensi perempuan Bali yang besar untuk berkontribusi secara signifikan. Pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1968 hingga pertengahan tahun 2019, pemerintahan menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor yang strategis dan penting bagi pembangunan nasional.

Terdapat beberapa sektor yang ikut serta berperan terkait dengan keberadaan sektor pariwisata (Haryanto, 2023). Perkembangan pariwisata Bali merupakan salah satu aset negara yang merupakan penyumbang terbesar kedua devisa negara setelah minyak kelapa sawit mentah (Suwarti, 2020). Pertumbuhan pariwisata Bali juga mendorong adanya berbagai pembangunan infrastruktur seperti hotel, bandara, jalan, dan sarana publik lainnya. Pembangunan ini tidak hanya mendukung sektor pariwisata itu sendiri tetapi juga memperbaiki infrastruktur dasar yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Bali. Dengan adanya pemberdayaan pekerja perempuan di sektor pariwisata Bali menjadi semakin penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender.

Pekerja perempuan merupakan seseorang yang mampu melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa guna memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. GBHN 1988, dalam bidang peranan wanita dalam pembangunan bangsa, wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber instansi bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama



[Vol. 3, No. 1, 2023]

dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dalam segenap kegiatan pembangunan (Press, 2018). Sektor pariwisata Bali mempunyai peran yang penting dalam memberikan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi bagi perempuan Bali. perempuan memiliki peran yang sangat penting terhadap budaya dan sosial di Bali, mulai dari menjadi pengusaha mikro, hingga menjadi tenaga kerja di hotel, restoran, dan industri kreatif terkait pariwisata.

Pariwisata global merujuk pada industri pariwisata yang melibatkan perjalanan dan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di seluruh dunia. Industri ini mencakup berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pariwisata global juga dapat mencakup beberapa Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Bali dalam industri pariwisata. Namun, dalam mengembangkan sektor pariwisata, penting untuk tidak melupakan kesetaraan gender. Masih terdapat beberapa permasalahan serius dalam mencapai kesetaraan gender di industri pariwisata di seluruh dunia. industri pariwisata Bali juga memberikan peluang bagi perempuan guna mengakses dan memanfaatkan industri pariwisata tersebut (Press, 2018). Akan tetapi dibalik keindahan serta keragaman budaya Bali, terdapat tantangan yang dihadapi para pekerja perempuan di sektor pariwisata Bali.

Perempuan di Bali sangat banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan pariwisata Bali, akan tetapi apresiasi dari berbagai pihak terhadap pekerja perempuan di sektor pariwisata Bali sangat kurang. Pemerintah provinsi Bali, misalnya, lebih melihat peranan laki-laki daripada perempuan dalam pembangunan pariwisata (Press, 2018). Pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata bukan hanya tentang menciptakan kesempatan kerja, tetapi juga tentang memastikan bahwa perempuan



[Vol. 3, No. 1, 2023]

memiliki akses yang sama dengan pria dalam hal pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan kontrol atas sumber daya ekonomi.

Populasi pekerja perempuan dalam dunia pariwisata umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Diskriminasi gender yang akhirnya membatasi gerak perempuan dalam kegiatan tersebut, pekerja perempuan di Bali sering kali mengalami upah rendah, jam kerja yang panjang, kurangnya akses terhadap pelatihan dan Pendidikan serta keterbatasan akses terhadap posisi manajerial. Selain itu, ketidakpastian kerja serta kurangnya relasi yang menjadi faktor kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi pekerja perempuan di sektor pariwisata Bali. Para pekerja perempuan di sektor pariwisata Bali juga rentan terhadap pelecehan seksual serta eksploitasi karena posisi mereka yang rentan dan terbatasnya perlindungan hukum yang kurang memadai. Di samping itu karena adanya faktor norma sosial yang tidak memperbolehkan perempuan bekerja dalam bidang tertentu sangat berperan dalam lemahnya pemberdayaan pekerja perempuan Bali. Salah satu contohnya, perempuan di Bali masih bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak, yang dapat menjadi hambatan bagi perempuan Bali dalam mengejar karir atau peluang Pendidikan yang lebih tinggi dalam industri pariwisata. Di Himalaya seorang guide harus seorang laki-laki, bukan wanita. Dengan begitu kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sudah terhambat oleh norma sosial yang berlaku pada daerah tersebut (Suardana, 2021).

Melalui pemberdayaan perempuan di dunia pariwisata, negara memanfaatkan potensi sumber daya manusia secara lebih efektif. Pada saat perempuan didorong untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan pariwisata, dalam hal ini dapat menyebabkan peningkatan kesejahteraan ekonomi pekerja perempuan Bali serta Masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya berbagai organisasi non-pemerintah (NGO), Lembaga internasional, dan pemerintah setempat telah meluncurkan berbagai inisiatif



[Vol. 3, No. 1, 2023]

untuk memperkuat peran perempuan dalam sektor pariwisata Bali. seperti adanya program pelatihan keterampilan untuk perempuan, akses ke kredit mikro dan usaha kecil, serta kampanye untuk meningkatkan akan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi lokal. Dengan adanya beberapa koperasi di Bali yang didirikan untuk memberdayakan perempuan dengan menyediakan akses ke pasar, pelatihan bisnis, dan modal usaha.

Tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan pemberdayaan pekerja perempuan di sektor pariwisata Bali berkelanjutan. Pengembangan kebijakan inklusif, investasi dalam Pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi merupakan langkah yang harus diambil untuk masa depan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan serta menciptakan lingkungan yang di mana perempuan dapat berperan aktif dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan.

Dengan adanya perempuan dalam sektor pariwisata membantu diversifikasi ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan sektor-sektor lain yang mungkin rentan terhadap perubahan ekonomi global. Peningkatan pendapatan perempuan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan komunitas secara keseluruhan, hal ini dapat meningkatkan akses terhadap layanan Kesehatan, Pendidikan, infrastruktur, dan fasilitas lainnya. Dengan adanya pelatihan serta Pendidikan, pekerja perempuan di Bali dapat meningkatkan keterampilan pekerja perempuan di Bali dalam manajemen, keuangan, serta pemasaran. Dalam hal ini dapat memberikan peluang baru bagi perempuan untuk bekerja di sektor pariwisata, yang juga dapat memperkuat stereotip gender dan menciptakan tekanan baru yang mempengaruhi kehidupan perempuan di pulau Bali.

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor pariwisata tidak hanya berdampak pada tingkat individual atau komunitas tetapi juga



[Vol. 3, No. 1, 2023]

berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan secara lebih luas. Perempuan cenderung lebih banyak menginvestasikan pendapatan mereka kembali ke keluarga dan pendidikan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan siklus positif perkembangan sosial dan ekonomi. Dengan adanya pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata Bali diharapkan perempuan dapat lebih aktif dan berperan secara optimal dalam mengembangkan sektor pariwisata Bali secara berkelanjutan. Potensi perempuan sebagai bagian dalam menunjang pembangunan nasional tidak dapat disangkal lagi, terutama dalam sektor pariwisata. Semakin banyaknya minat pekerja perempuan, karena dunia kerja pariwisata menuntut adanya suatu sikap keramah-tamahan yang biasanya dimiliki pekerja perempuan secara alamiah (Haslinda, 2017).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan pekerja perempuan di sektor pariwisata Bali. Data penelitian yang dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dari berbagai sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen terkait dengan pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata Bali, seperti peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan literatur hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang pemberdayaan pekerja perempuan di sektor pariwisata Bali. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pemberdayaan pekerja perempuan di sektor pariwisata Bali.



PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Fenomena Pekerja Perempuan Pada Pariwisata Bali

Dunia pariwisata Indonesia sudah memperlihatkan perkembangannya dengan pesat. dapat dilihat banyaknya angkatan kerja baik untuk pria maupun wanita. Tenaga kerja wanita yang terjun ke dunia industri pariwisata ada yang masih lajang maupun yang sudah menikah. Peran ganda bagi wanita yang sudah menikah dan bekerja di dunia pariwisata mempunyai problematika tersendiri, dimana mereka bekerja juga harus merawat keluarga. Kesetaraan gender tidak hanya menguntungkan wanita, juga pria. Kuncinya, kaum hawa harus mencapai kemandirian financial terlebih dahulu. Sejalan dengan perkembangan pariwisata, akan banyak muncul kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh kaum perempuan. Akan semakin banyak pula kaum perempuan yang memasuki wilayah kerja kaum laki-laki dengan konsekuensi masalah gender akan menghadang mereka. Tenaga kerja wanita di bidang pariwisata relatif lebih unggul dibanding pria, terutama dalam hal memberikan jasa pelayanan bidang hospitality, wanita lebih luwes, sabar dan teliti. Namun demikian, pekerja wanita masih menghadapi kendala terutama dalam hal perlindungan kerja (Suwarti, 2020).

Pulau Bali, yang dikenal sebagai "Pulau Dewata," dengan berbagai keindahan alamnya yang menawan dan budaya yang masih terjaga merupakan salah satu destinasi pariwisata terpopuler di dunia. Pariwisata di Bali telah lama menjadi motor penggerak utama bagi ekonomi regional, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pariwisata Bali telah menjadi sumber utama pekerjaan bagi perempuan di Bali. Pemberdayaan perempuan dalam sektor pariwisata bukan hanya mengacu pada peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan



[Vol. 3, No. 1, 2023]

ekonomi dan sosial. Pariwisata merupakan sektor utama ekonomi Bali, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan pariwisata, penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, mendapatkan manfaat yang setara. Pemberdayaan perempuan dalam sektor pariwisata Bali bukan hanya soal kesetaraan gender, tetapi juga peningkatan kualitas hidup dan ekonomi keluarga. Keterlibatan perempuan Bali pada dunia industri pariwisata, walaupun pada kenyataannya masih terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan kerja. Perempuan yang bekerja dapat membantu suami dalam mendukung perekonomian keluarga. Untuk membantu ekonomi keluarga peran perempuan yang bekerja sangat dibutuhkan terutama dalam hal menambah penghasilan (Osin et al., 2020).

Pemberdayaan secara sosial didefinisikan sebagai suatu situasi dimana rasa kesatuan dan integritas sebuah kelompok masyarakat menjadi semakin kuat. Fungsi pariwisata sebagai faktor yang menunjang pemberdayaan sosial sangatlah penting, karena dengan dibangunnya '*community-based tourism*' akan memberikan pengaruh dinamika sosial yang cukup kuat bagi kelompok masyarakat tersebut. Akibatnya, anggota masyarakat akan merasa diikut sertakan dalam kegiatan pariwisata, yang berhasil. Pemberdayaan sosial yang bisa dilihat secara langsung dan tidak langsung dengan dilakukannya kegiatan pariwisata adalah semakin terbukanya kesempatan masyarakat setempat terhadap akses umum seperti misalnya air bersih, jalan yang semakin baik serta klinik-klinik kesehatan. Sedangkan dari perspektif budaya, serta pariwisata yang dikelola dengan baik juga memungkinkan untuk digunakan sebagai suatu sarana untuk mempertahankan keberadaan budaya asli penduduk setempat (Suardana, 2021).



[Vol. 3, No. 1, 2023]

Perempuan sering diposisikan sebagai kaum marginal dalam berbagai bidang kehidupan, terutama posisi perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata. Perempuan di Bali sangat dikenal sebagai sosok yang kuat dan tangguh. Mereka mampu menjalani dan menjalankan berbagai peran dalam kehidupan adat, agama serta ekonomi. Dengan tumbuhnya Sikap pekerja keras dan ketangguhan perempuan di Bali merupakan warisan masa lalu dalam budaya agraris yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Bali. Perempuan Bali juga memiliki sumber daya yang mampu mengantarkan mereka berada pada dua ranah yakni ranah domestik dan ranah publik. Mereka bisa berkarya di luar rumah dan mampu melaksanakan kewajibannya dalam keluarga, adat dan agama secara lebih luas. Keterlibatan perempuan Bali dalam dua ranah tersebut menyatakan bahwa peran perempuan yang biasa disebut sebagai dualisme kultural (Prasiasa et al., 2023).

Dalam perekonomian suatu negara kesetaraan gender dapat menjadi dampak yang positif dari adanya kesetaraan gender ini. Pertama, dalam hal pemberdayaan manusia terutama nya perempuan. Pengembangan pariwisata dapat memberikan peluang kerja bagi perempuan, baik secara formal maupun dalam posisi manajerial, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kedua, kesetaraan gender dapat menjadi wadah pendapatan devisa. Dimana dalam hal ini pariwisata dapat menjadi penghasil devisa utama, yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah dan negara. Ketiga, penciptaan lapangan pekerjaan. Pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Keempat, Pengaruh Budaya.

Adanya Pariwisata, suatu negara dapat memperkenalkan budaya pada wisatawan asing, yang dapat mempengaruhi persepsi dan kesetaraan gender dalam masyarakat Kesetaraan gender dalam pariwisata global dapat mempengaruhi pengelolaan objek wisata dengan cara meningkatkan



[Vol. 3, No. 1, 2023]

partisipasi perempuan dalam pengelolaan objek wisata. Dalam sebuah penelitian menyebutkan di Kota Denpasar menunjukkan bahwa perempuan berperan dan terlibat aktif dalam pengelolaan objek wisata Tukad Bindu, namun representasi kaum perempuan secara administratif belum optimal. Melalui implementasi kebijakan pengarusutamaan gender, seperti pelatihan dan sosialisasi kesetaraan gender, serta pembentukan tim kerja yang responsif gender, pengelola objek wisata dan masyarakat dapat mendukung dan menerima kebijakan kesetaraan gender. Selain itu, kesetaraan gender dalam pariwisata global juga dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara, seperti pemberdayaan perempuan, penciptaan lapangan kerja, dan pengaruh budaya.

Pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari selama ini masih mengalami berbagai kendala yang dapat diartikan bahwa kaum perempuan belum saatnya untuk mandiri secara total. Misalnya pekerja perempuan tidak bisa bekerja dalam kondisi sedang hamil, harus mendapat ijin dari suami, keluarga dan perusahaan harus menyediakan angkutan antar jemput. Di dalam keluarga biasanya laki-laki mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan perempuan. Hal ini sangat jelas pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit. Orang tua cenderung memilih anak laki-laki untuk melanjutkan studi daripada anak perempuan sehingga pada akhirnya akan berdampak kepada perbedaan pengetahuan dan kemampuan (Haslinda, 2017). Dengan mengadakan program-program pendidikan dan pelatihan harus lebih diintensifkan dan diakses oleh perempuan, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Dalam hal ini akan membantu meningkatkan keterampilan dan kapasitas pekerja Perempuan untuk bersaing di pasar kerja pariwisata yang semakin global.

Banyak disebutkan bahwa posisi wanita yang bekerja dibidang pariwisata memperoleh image yang tidak baik. Wanita yang bekerja di hotel, misalnya, sering diasosiasikan dengan jasa atau layanan seksual sehingga



[Vol. 3, No. 1, 2023]

perempuan seolah-olah tidak mempunyai harga diri. Dari posisi diri dan peran wanita dibidang pariwisata tersebut, ia juga menyebutkan beberapa keuntungan yang didapatkan oleh wanita dimasa mendatang dari keterlibatannya dalam pembangunan pariwisata, antara lain, dalam beberapa konteks terdapat kesempatan bagi wanita untuk mengembangkan usaha pariwisata yang profitable, adanya kesempatan untuk berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mereka mengenai peran wanita dalam berbagai konteks. Di samping itu hal tersebut dapat meningkatkan akses wanita kepada pekerjaan dan penghasilan sehingga akan membuat mereka lebih reflektif menghadapi berbagai situasi, pariwisata menciptakan kesempatan untuk memperoleh akses yang lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi di sektor formal dan hal ini telah membantu meningkatkan visibility wanita dalam perempuan dalam perekonomian nasional serta menyebabkan tumbuhnya pengakuan publik atas perempuan dalam pembangunan (Suwarti, 2020).

Salah satu upaya pemberdayaan pekerja perempuan di sektor pariwisata Bali adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program-program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan diadakan untuk membantu mereka memulai dan mengelola usaha mereka sendiri. Misalnya, banyak perempuan yang dilatih dalam bidang kerajinan tangan, kuliner, dan manajemen homestay. Organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga pemerintah juga berperan dalam memberikan akses permodalan dan pendampingan bisnis. Dengan dukungan ini, banyak perempuan Bali yang berhasil membuka usaha kecil seperti toko souvenir, warung makan, dan penginapan, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal. Terdapat beberapa motif yang mendukung perempuan bekerja yaitu antara lain karena finansial, kebutuhan sosial, kebutuhan aktualisasi. Pandangan seseorang



[Vol. 3, No. 1, 2023]

perempuan yang telah bekerja sepertinya mulai bergeser karena adanya berbagai tuntutan hidup yang harus dipenuhi terutama untuk mencapai kualitas hidup yang diinginkan dan juga sebagai patokan kesejahteraan seseorang (Osin et al., 2020).

Pendidikan dan pelatihan merupakan elemen kunci dalam pemberdayaan pekerja perempuan di sektor pariwisata. Program-program pelatihan yang dirancang khusus untuk perempuan, seperti pelatihan bahasa asing, manajemen pariwisata, dan keterampilan digital, membantu mereka bersaing di pasar kerja. Dengan memiliki keterampilan yang relevan, pekerja perempuan di Bali dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik dan berpotensi mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu, ada juga upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Dengan memastikan bahwa anak perempuan mendapatkan pendidikan yang layak, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi aktif dalam sektor pariwisata di masa depan.

Pemberdayaan pekerja perempuan di sektor pariwisata tidak akan lengkap tanpa perlindungan hak dan kesejahteraan. Banyak inisiatif yang diambil untuk memastikan bahwa perempuan yang bekerja di sektor pariwisata mendapatkan perlindungan yang layak. Hal ini meliputi perlindungan dari diskriminasi, pelecehan, dan eksploitasi. Organisasi pekerja dan serikat pekerja berperan penting dalam advokasi hak-hak pekerja perempuan. Mereka bekerja sama dengan pihak pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, pekerja perempuan di sektor pariwisata dapat bekerja dengan rasa aman dan nyaman. Pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap pemberdayaan pekerja perempuan melalui kebijakan atau program kerja. Kebijakan tersebut harus mampu mendukung hak-hak perempuan di dunia kerja dan



[Vol. 3, No. 1, 2023]

menciptakan lingkungan sosial yang setara. Isu-isu tentang kesetaraan upah, kesetaraan akses terhadap karir, dan penolakan terhadap diskriminasi gender harus terdapat dalam kebijakan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk jaminan hukum yang diberikan pemerintah terhadap perempuan untuk menanggulangi persoalan ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja (Abdillah, 2024).

Pemberdayaan pekerja perempuan juga berarti memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Di sektor pariwisata, ini bisa berarti melibatkan perempuan dalam manajemen hotel, agen perjalanan, dan organisasi pariwisata. Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan. Program mentorship dan networking sering kali diadakan untuk membantu perempuan mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan membangun jaringan profesional. Dengan lebih banyak perempuan dalam posisi kepemimpinan, diharapkan akan ada kebijakan dan praktik yang lebih inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata. Dengan Upaya pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata Bali merupakan langkah penting dalam mencapai kesetaraan gender dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan akses kepada pendidikan, pelatihan, dan peluang ekonomi, serta melindungi hak-hak mereka, perempuan Bali dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan sektor pariwisata. Partisipasi aktif perempuan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri, tetapi juga membawa manfaat besar bagi perekonomian dan budaya Bali secara keseluruhan. Pemberdayaan perempuan adalah kunci untuk menciptakan sektor pariwisata yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil.

Kesetaraan gender bukan hanya penting dalam hal hak asasi manusia, tetapi juga dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan perdamaian dunia. Dengan mengatasi ketidakadilan gender dalam sektor pariwisata, kita



[Vol. 3, No. 1, 2023]

dapat memastikan peluang dan manfaat yang adil bagi semua, dan membangun dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mari bersama-sama bekerja menuju kesetaraan gender dalam pembangunan pariwisata dunia, menghargai dan memberdayakan peran perempuan dalam sektor ini. Dengan melakukan hal itu, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Dengan mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan akses dan dukungan terhadap perempuan di sektor pariwisata Bali, kita dapat memperkuat peran mereka sebagai agen pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang memberikan kesempatan kerja, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara penuh dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan masyarakat Bali secara keseluruhan. Melalui komitmen bersama dan implementasi strategi yang tepat, kita dapat mencapai tujuan inklusi dan kesetaraan gender dalam sektor pariwisata, menjadikan Bali sebagai contoh yang inspiratif bagi wilayah lain di Indonesia dan di dunia.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan di Sektor Wisata Bali

Pemberdayaan pekerja perempuan dalam sektor pariwisata Bali telah diungkapkan dalam berbagai jurnal. Salah satu aspek utama yang dibahas adalah peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja pariwisata yang menunjukkan bahwa sektor pariwisata memberikan peluang kerja yang signifikan bagi perempuan, baik di sektor formal maupun informal. Peran perempuan tidak hanya terbatas pada pekerjaan langsung di industri pariwisata seperti pemandu wisata atau tenaga kerja hotel, tetapi juga mencakup sektor-sektor pendukung seperti kerajinan tangan dan industri makanan. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, pemberdayaan pekerja perempuan di sektor pariwisata Bali masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah akses terhadap pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan



[Vol. 3, No. 1, 2023]

keterampilan perempuan bahwa meskipun ada program-program pelatihan yang tersedia, masih ada kesenjangan dalam akses dan partisipasi perempuan dalam pelatihan ini.

Masuknya perempuan dalam dunia kerja juga tidak terlepas dari adanya pengaruh era globalisasi yang memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk bekerja atau berkarir diluar rumah demi untuk menopang perekonomian keluarganya (Akbar, 2017). Secara kodrat, eksistensi kedudukan perempuan memang memiliki kemampuan yang tidak sama dengan laki-laki, karena itu, Undang-Undang diberikan perlakuan yang lebih khusus. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa: “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita” (Fajrina, 2019).

Dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (1), (2), (3), dan (4) disebutkan bahwa, perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh perempuan, merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai hak asasi manusia yang senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi. Karena itu, UU No.13 Tahun 2003 ini, juga mengatur dan memberikan beberapa keringanan kepada pekerja atau buruh perempuan. Keringanan ini diberikan guna melindungi pekerja atau buruh perempuan yang secara kodrati perempuan memiliki tugas dan fungsi lain yang lebih penting dalam masyarakat, yaitu reproduksi.

Dari saking, begitu urgennya posisi perempuan, maka Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 hingga 07.00. bahkan, para pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut dokter. Pengusaha yang mempekerjakan



[Vol. 3, No. 1, 2023]

pekerja/buruh perempuan di antara pukul 23.00 hingga 07.00 wajib memberi makan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dan menyediakan angkutan antar jemput yang berangkat dan pulang kerja antara pukul tersebut. Tujuan adanya perlindungan hukum terhadap pekerja adalah untuk memberikan perlindungan dari kekuasaan perusahaan serta terciptanya suasana yang damai pada suatu perusahaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip hubungan industrial.

Dalam rangka mengembangkan pemberdayaan perempuan dalam sektor pariwisata di Bali, perlu dilakukan beberapa langkah, *pertama*, memperbaiki tatanan dan implementasi perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Bali. *Kedua*, kesetaraan gender dalam pengelolaan pariwisata di Bali. Memperkuat ideologi gender yang mendasarkan diri pada Ibuisme. Mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang. Mempertimbangkan peran ganda perempuan dalam pengelolaan pariwisata di Bali. Memperkuat organisasi-organisasi perempuan untuk membantu pemerintah dalam menyebarkan ideologi gender. Mendorong kesetaraan gender di semua sektor termasuk dunia kuliner yang masuk ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam hal ini, pemberdayaan perempuan dalam sektor pariwisata di Bali merupakan suatu peran yang sangat penting dan harus diperhatikan. Perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kesetaraan gender dalam pengelolaan pariwisata di Bali, mempertimbangkan ganda peran perempuan, dan mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang.

Dengan memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja perempuan pada sektor pariwisata Bali tidak hanya akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, tetapi juga akan memperkuat sosial dan kultural masyarakat Bali secara keseluruhan. Melalui kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dapat diciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi perempuan Bali dalam



[Vol. 3, No. 1, 2023]

era pariwisata global yang semakin berkembang pesat. Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dalam sektor pariwisata Bali yang merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja yang berarti bahwa pada dasarnya memperoleh suatu pekerjaan adalah hak asasi setiap manusia yang bersifat fundamental. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*” (Muladi, 2009). Atas dasar ini, hak untuk bekerja tidak hanya diberikan kepada kaum laki-laki saja, akan tetapi juga diberikan kepada kaum perempuan, sebab secara normatif baik antara laki-laki maupun perempuan pada dasarnya mempunyai hak yang sama untuk mengenyam suatu profesi atau pekerjaan sehingga dalam hal ini tidak dibenarkan adanya tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, bahwa; “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif*” (Muladi, 2009).

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pekerja perempuan pada sektor pariwisata Bali tidak hanya akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, tetapi juga akan memperkuat sosial dan kultural masyarakat Bali secara keseluruhan, sehingga diperlukan kehadiran pemerintah dan negara dalam memberikan perlindungan. Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dalam sektor pariwisata Bali yang merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam hukum



[Vol. 3, No. 1, 2023]

ketenagakerjaan, Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja yang berarti bahwa pada dasarnya memperoleh suatu pekerjaan adalah hak asasi setiap manusia yang bersifat fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L. (2024). Home Industry sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan di Pulau Sabang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 8(1).
- Akbar, V. (2017). *Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Fajrina, P. A. P. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Hukum Positif Indonesia* [Skripsi]. Universitas Mataram.
- Haryanto, A. T. (2023). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM SEKTOR PARIWISATA. *THE COMMUNITY*, 1(1). <https://doi.org/10.33061/tc.v1i1.6556>
- Haslinda, H. (2017). PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM DUNIA PARIWISATA. *An Nisa: Jurnal Gender Dan Anak*, 10(1). <https://doi.org/10.30863/an.v10i1.387>
- Muladi, M. (2009). *Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama.
- Osin, R. F., Pibriari, N. P. W., & Anggayana, I. W. A. (2020). MEMAKSIMALKAN PELAYANAN WISATA SPA DI KABUPATEN BADUNG DALAM USAHA YANG DIJALANKAN OLEH PEREMPUAN BALI. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 15(1). <https://doi.org/10.36002/jep.v15i1.1075>
- Prasiasa, D. P. O., Komalasari, Y., & Widari, D. A. D. S. (2023). Perempuan Bali dalam Pengelolaan Pariwisata di Bali. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 4(1), 27–40. <https://doi.org/10.22373/jsai.v4i1.2557>



[Vol. 3, No. 1, 2023]

- Press, I. (2018). Harmonisasi Gender dalam Keluarga pada Zaman Now. *Harmonisasi Gender Dalam Keluarga Pada Zaman Now*, 19 April 2018.
- Suardana, I. W. (2021). Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Kuta sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pariwisata Bali. *Piramida*, 4(2).
- Suwarti, S. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Wanita di Bidang Pariwisata (Studi Kasus di Kota Semarang). *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 16(3), 189–201.
<https://doi.org/10.56910/gemawisata.v16i3.129>